

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan renstra RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up.

Adapun fungsi penyusunan Renstra UPTD RSUD Dr H kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pengembangan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD Dr H Kumpulan Pane dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam mendukung Visi Pemerintah Kota Tahun 2023-2026. Berikut alur Perencanaan Renstra UPTD RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/MENKES/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi menjadi Kelas B Non Pendidikan.
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No 4 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi.
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Daerah Menengah (RPJMD) Kota Tebing tinggi Tahun 2022-2027.
15. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 900/832 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai arah dalam pengembangan RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 serta mewujudkan perencanaan,

pemilihan program dan kegiatan prioritas yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Kota Tebing Tinggi dibidang kesehatan khususnya Rumah Sakit.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Strategis RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan/ atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja RSUD Dr.H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan, peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra kementerian/ lembaga dan renstra provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yaitu 2023-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penjelasan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam hal ini RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026.

BAB IX : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

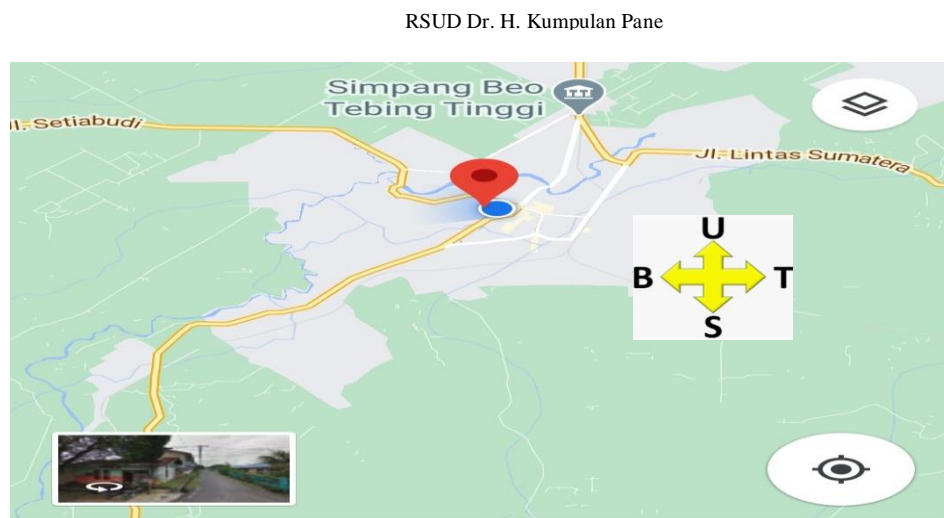
Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera utara yang terletak di jalur lintas timur pulau Sumatera dengan aktivitas lalu lintas dan perekonomian yang tinggi.

Kota Tebing Tinggi dengan jarak 78 kilometer dari Kota Medan juga menghubungkan beberapa daerah Kabupaten Kota lain menuju Kota Medan, Ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Tebing Tinggi secara geografis terletak pada koordinat : 3°19'00" – 3°21'00" Lintang Utara dan 98°11' – 98°21' Bujur Timur dengan luas wilayah 38.438 km².

Kota Tebing Tinggi dikelilingi oleh Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas- batas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah :

- Sebelah Utara : PTPN III Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Selatan : PTPN III Kebun Pabatu dan Kebun Paya Pinang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Timur dengan PT Socfindo Kebun Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Barat dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambar 2.1: Peta RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
(Sumber:Google Maps)

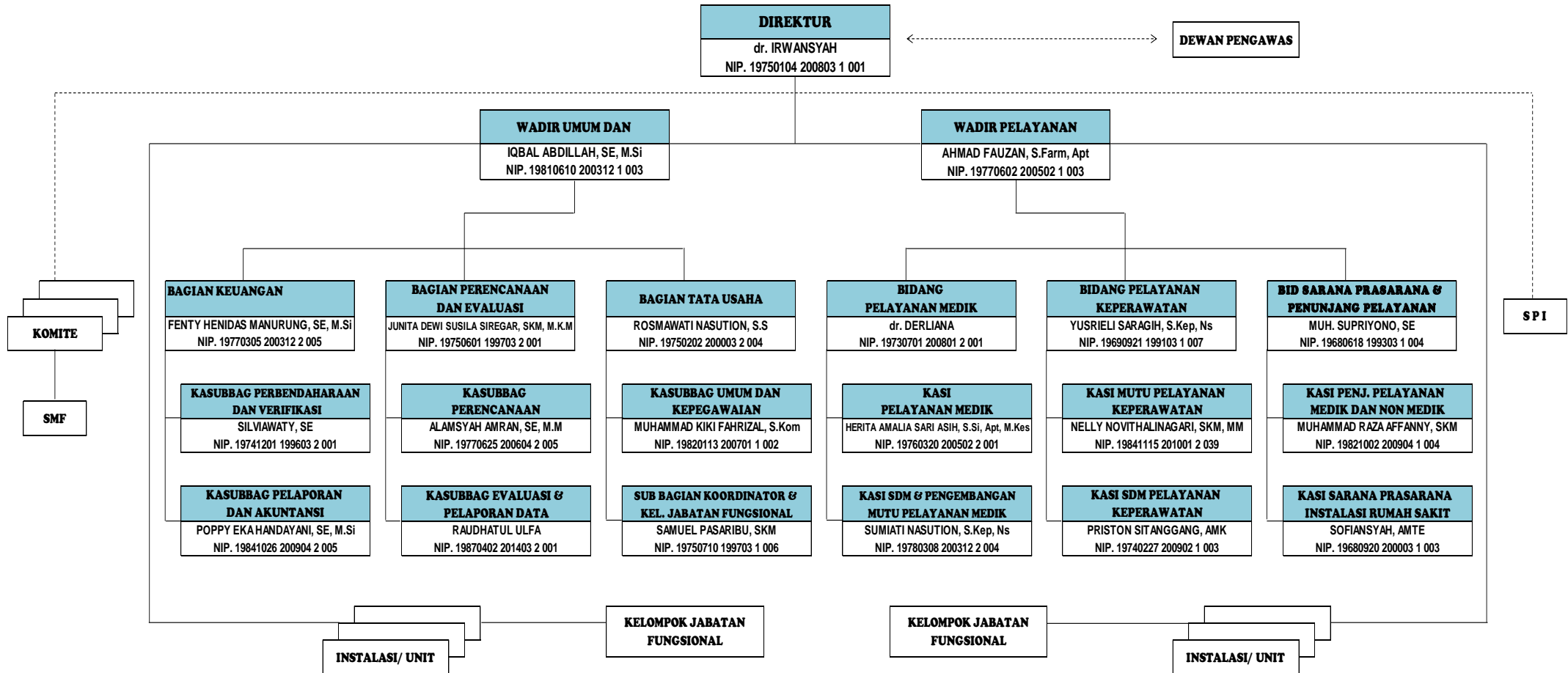


Kota Tebing Tinggi yang terbagi dalam 5 Kecamatan dan 35 kelurahan memiliki jumlah penduduk sebanyak 172.838 jiwa, yang terdiri dari 86.032 orang laki-laki dan 86.806 orang perempuan dengan kepadatan penduduk 4,49 ribu jiwa/km² dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,70%, serta jumlah penduduk miskin sebesar 16,32/1000 Orang (Kota Tebing Tinggi dalam angka,BPS, 2020).

Dengan berbagai kondisi yang mendukung diatas, Kota tebing Tinggi memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai fasilitas publik terutama fasilitas kesehatan yang memadai dan memudahkan masyarakat untuk dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Pada saat ini Kota Tebing Tinggi memiliki fasilitas kesehatan rujukan yaitu UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi merupakan satu-satunya Rumah Sakit dengan kelas B di Kota Tebing Tinggi dan terletak di lokasi yang strategis yaitu di tengah Kota serta mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya.

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI



2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 4 (empat) tahun mendatang.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terakhir untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 telah mengikuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru bertujuan agar terjadi sinergitas dengan berbagai peraturan lain yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu penyempurnaan pengaturan juga dilakukan untuk menjawab permasalahan pada Pemerintah Daerah serta untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

2.3 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan

neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Periode kinerja keuangan masa lalu Pemerintah Kota Tebing Tinggi disajikan mulai Tahun 2017-2021.

2.4 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2017-2021 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Tabel 2.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata Pertum- buan (%)
1	PENDAPATAN	43.566.517.751,00	54.778.307.108,00	38.286.531.207,95	31.151.592.751,00	21.665.674.984,00	-13,04
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	43.566.517.751,00	54.778.307.108,00	38.286.531.207,95	31.151.592.751,00	21.665.674.984,00	-13,04
1.1.1.	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	43.566.517.751,00	54.778.307.108,00	38.286.531.207,95	31.151.592.751,00	21.665.674.984,00	-13,04
1.2.	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bukan pajak						
1.2.2	Dana alokasi umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus(***)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber data keuangan RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

2.5 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja	78.137.156.262,00	87.110.582.585,95	71.758.525.640,00	65.287.818.238,00	53.526.645.916,30	-7,29
2.1.	Belanja Tidak Langsung	20.505.966.792,00	21.585.603.282,00	19.834.493.564,00	20.844.732.034,00	23.651.948.699,00	2,90
2.1.1.	Belanja Pegawai	20.505.966.792,00	21.585.603.282,00	19.834.493.564,00	20.844.732.034,00	23.651.948.699,00	2,90
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Belanja Langsung	57.631.189.470,00	65.524.979.303,95	51.924.032.076,00	44.443.086.204,00	29.874.697.217,30	-22,25
2.2.1	Belanja Pegawai	3.051.360.000,00	4.043.024.000,00	3.719.760.000,00	2.746.720.000,00	3.381.500.000,00	2,08
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.896.899.220,00	49.929.926.768,00	36.835.963.533,00	29.973.023.093,00	20.153.911.258,30	-14,42
2.2.3	Belanja Modal	10.682.930.250,00	11.552.028.535,95	11.368.308.543,00	11.723.343.111,00	6.339.285.959,00	-9,91

Sumber data keuangan RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

2. Pembiayaan Daerah

Tabel 2.3 Realisasi Biaya Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	0	0	0	0	0	0
2	Divestasi	0	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Utang/Pinjaman	0	0	0	0	0	0

Sumber data keuangan RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

2.5 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para

ke kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan neraca daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan Neraca UPTD RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021 dan rata-rata pertumbuhannya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

**Tabel 2.4 Neraca Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	19.656.343.391,00	14.305.382.029,00	13.360.090.639,95	6.541.734.551,95	13.326.207.679,95	-7,48
1.1.1.	Kas	80.074.225,00	2.891.421.721,00	79.020.773,95	97.633.333,95	366.485.198,95	35,55
1.1.2.	Piutang	18.141.639.406,00	8.852.084.109,00	10.966.975.942,00	5.491.672.991,00	11.809.719.116,00	-8,23
1.1.3.	Beban Dibayar Dimuka	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	52.506.286,00	0,00	-100,00
1.1.4.	Persediaan	1.426.929.760,00	2.554.176.199,00	2.300.939.379,00	899.921.941,00	1.150.003.365,00	-4,22
1.1.5.	Persediaan	0,00	0,00	5.454.545,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ASET TETAP	60.265.765.033,39	71.894.477.533,03	74.576.477.255,41	72.563.536.189,25	66.354.811.917,88	1,94
1.2.1.	Tanah	7.777.938.000,00	7.777.938.000,00	7.777.938.000,00	7.777.938.000,00	7.777.938.000,00	0,00
1.2.2.	Peralatan dan mesin	72.786.731.184,75	86.522.370.518,40	97.178.799.060,65	108.854.553.812,00	116.218.347.307,00	9,81
1.2.3.	Gedung dan bangunan	58.756.390.233,00	68.841.054.733,00	70.184.744.675,00	70.230.534.675,00	71.726.278.590,63	4,07
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	5.666.923.500,00	5.666.923.500,00	5.736.221.500,00	5.760.110.712,00	5.760.110.712,00	0,33
1.2.5.	Aset tetap lainnya	33.447.600,00	78.876.240,00	78.876.240,00	78.876.240,00	78.876.240,00	18,72
1.2.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Akumulasi penyusutan	(84.755.665.484,36)	(96.992.685.458,37)	(106.380.102.220,24)	(120.138.477.249,75)	(135.206.738.931,75)	9,79
1.3.	ASET LAINNYA	5.899.263.967,00	5.920.310.360,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.	Aset lain-lain	5.899.263.967,00	5.920.310.360,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	JUMLAH ASET	85.821.372.391,39	92.120.169.922,03	87.936.567.895,36	79.105.270.741,20	79.681.019.597,83	-1,47

2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27.689.859.124,00	32.495.219.317,00	30.102.336.425,00	14.772.756.811,00	23.057.814.126,90	-3,60
2.1.1.	Pendapatan diterima	3.833.335,00	0,00	52.181.782,00	78.181.782,00	58.431.782,00	72,43
2.1.2.	Utang Beban	26.951.958.289,00	32.495.219.317,00	20.049.694.545,00	5.555.946.812,00	12.286.068.410,90	-14,54
2.1.3.	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	734.067.500,00	0,00	10.000.460.098,00	9.138.628.217,00	10.713.313.934,00	70,94
3	EKUITAS	58.131.513.267,39	59.624.950.605,03	57.834.231.470,36	64.332.513.930,20	56.623.205.470,93	-0,52
3.1.	EKUITAS	58.131.513.267,39	59.624.950.605,03	57.834.231.470,36	64.332.513.930,20	56.623.205.470,93	-0,52
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	85.821.372.391,39	92.120.169.922,03	87.936.567.895,36	79.105.270.741,20	79.681.019.597,83	-1,47

Sumber data keuangan RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

2.6 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran menghitung perbandingan antara belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan belanja daerah. Berikut disajikan data tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Tebing Tinggi

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2017	23.557.326.792	78.137.156.262,00	0,30
2	2018	25.628.627.282	87.110.582.585,95	0,29
3	2019	23.554.253.564	71.758.525.640,00	0,33
4	2020	23.591.452.034	65.287.818.238,00	0,36
5	2021	27.033.448.699	53.526.645.916,30	0,51

Sumber data keuangan RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.6
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Tebing Tinggi

NO	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan	43.566.517.751,00	54.778.307.108,00	38.286.531.207,95	31.151.592.751,00	21.665.674.984,00
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja	78.137.156.262,00	87.110.582.585,95	71.758.525.640,00	65.287.818.238,00	53.526.645.916,30
3.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit riil	-34.570.638.511,00	-32.332.275.477,95	-33.471.994.432,05	-34.136.225.487,00	-31.860.970.932,30

Kebijakan penutupan defisit anggaran yang berasal dari SiLPA yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	% dari	Rp	% dari	Rp	% dari	Rp	% dari	Rp	% dari
			SiLPA		SiLPA		SiLPA		SiLPA		SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	80.074.225,00		2.891.421.721,00		79.020.773,95		97.633.333,95		366.485.198,95	
2.	Pelampauan penerimaan PAD										
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	80.074.225,00	100%	2.891.421.721,00	100%	79.020.773,95	100%	97.633.333,95	100%	366.485.198,95	100%
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7.	Kegiatan lanjutan										

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi masalah pokok, masalah dan akar masalah berdasarkan analisis Rumah Sakit seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 : Identifikasi masalah pokok, masalah dan akar masalah
RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2022**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Banyaknya SDM yang profesional khususnya tenaga medis PNS yang bekerja di tempat pesaing.	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya pelayanan di rumah sakit sehingga terjadi ketidaknyamanan pasien yang membutuhkan penanganan pelayanan; • Adanya komplain pasien terhadap pelayanan rumah sakit; 	<ul style="list-style-type: none"> • Disiplin dari tenaga profesional belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2.	Masih banyak menggunakan tenaga kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga PNS yang ada belum memadai termasuk dokter spesialis dan sub spesialis; • Banyaknya anggaran yang dipakai untuk belanja pegawai yang bersumber dari dana BLUD; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya moratorium tentang penerimaan PNS.
3.	Perda tarif pelayanan sudah tidak layak	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perubahan perda tarif membutuhkan waktu yang sangat lama; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan rumah sakit kurang memadai untuk membiayai belanja operasional.
4.	Kapasitas SDM kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat; • Masih adanya Pemberdayaan pegawai yang belum sesuai disiplin ilmu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya biaya alokasi diklat;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Sesuai dengan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017– 2022, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah “Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”. Sedangkan bidang kesehatan termasuk dalam misi ketiga yaitu Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah dalam hal ini RSUD Dr.H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, sebagaimana disebutkan dalam bab diatas, faktor-

faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut diatas, sebagai berikut :

3.2.1 Faktor-Faktor Penghambat

- Banyaknya Rumah Sakit/ sarana pelayanan kesehatan pesaing di Kota Tebing Tinggi.
- Rumah Sakit tidak memiliki kewenangan teritorial
- Sering terjadi keterlambatan dalam pengklaiman BPJS
- Sistem pelayanan BPJS dengan sistem paket

3.2.2 Faktor-Faktor Pendorong

- Letak Rumah Sakit yang strategis, mudah dijangkau dan berbagai arah
- Adanya komitmen pemerintah kota Tebing Tinggi dengan adanya subsidi anggaran;
- Adanya kepercayaan masyarakat Tebing Tinggi dan sekitarnya menggunakan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan di Rumah Sakit
- Adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Propinsi

RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagai institusi pelayanan kesehatan dan dalam melaksanakan tugas pokok mengacu pada program pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan.

RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi berperan dalam menyediakan pelayanan rujukan/ lanjutan dalam kegiatan teknis operasional, sehingga kegiatan RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah. Peraturan presiden nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menyebutkan : SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis. Berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Rumah Sakit masuk ke dalam sub sistem upaya kesehatan perorangan diselenggarakan oleh pemerintah (termasuk TNI dan Polri), Pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan atau masyarakat/ swasta melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Merujuk Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 bahwa program/ kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit tercantum dalam program teknis yaitu program pembinaan upaya kesehatan khususnya dalam kegiatan pembinaan upaya kesehatan rujukan/ lanjutan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari Renstra Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

Faktor-faktor Penghambat :

- Pelayanan Rumah Sakit belum optimal
- Banyaknya SDM yang profesional khususnya tenaga medik yang bekerja di tempat pesaing
- Masih banyak menggunakan tenaga kontrak hingga membebani anggaran Rumah Sakit
- Perda tarif pelayanan sudah tidak layak
- Kapasitas SDM kurang memadai

Faktor-faktor Pendorong :

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi pola pengelolaan keuangannya dengan PPK-BLUD
- Kuantitas SDM memadai
- Sarana dan peralatan kedokteran yang canggih dan penggunaan teknologi kedokteran yang tepat dan unggul serta kemampuan Rumah Sakit dalam service innovations (pelayanan unggulan)
- Telah terakreditasi
- Satu satunya Rumah Sakit di Kota Tebing Tinggi dengan type B non pendidikan dan sebagai Rumah Sakit rujukan regional setempat
- Adanya kerjasama pelayanan dengan pihak ketiga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS.

Lokasi RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Akses yang mudah di jangkau menjadikan RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi meningkat terus kunjungannya sehingga antara kapasitas yang tersedia dengan kebutuhan pelayanan tidak seimbang, oleh karena itu penambahan fasilitas pelayanan baik jenis maupun jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Keterbatasan lahan Rumah Sakit menjadi salah satu kendala dalam pengembangan infrastruktur sehingga pengembangan Rumah Sakit harus mengkondisikan lahan yang tersedia.

Dalam zona wilayah rujukan untuk tingkat pelayanan lanjutan di Kota Tebing Tinggi terdapat 6 (enam) Rumah Sakit swasta, 9 (sembilan) puskesmas, 14 (empat belas) pustu, dan beberapa praktek dokter umum dan spesialis, dan klinik swasta, posisi RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi berada di wilayah inti kota.

Rencana pengembangan RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi kelas B non pendidikan menjadi Rumah Sakit kelas B pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah ini sedang berjalan dan bekerjasama dengan akademisi.

Ditinjau dari kondisi pelayanan Rumah Sakit faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan Rumah Sakit sebagai berikut :

Pelayanan Rumah Sakit dengan status kelas B non pendidikan, RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi memiliki dokter spesialis dan sub spesialis sebanyak 28 org dengan 17 pelayanan spesialis dan ditargetkan 32 dokter sehingga masih diperlukan tenaga dokter spesialis. Kapasitas tempat tidur dengan adanya gedung baru perawatan mampu menampung 412 tempat tidur, sementara yang ada baru 288 tempat tidur sehingga masih dibutuhkan penambahan tempat tidur.

Sasaran jangka menengah pada renstra RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi beberapa masih belum tercapai karena dipengaruhi faktor-faktor lain yang saling berkaitan. Diantaranya capaian standart pelayanan minimal baik dari sisi input, proses maupun outputnya yang belum terpenuhi.

Implikasi RTRW bagi pelayanan Rumah Sakit terutama pada permintaan masyarakat akan kebutuhan pelayanan menjadi tinggi sedangkan kapasitas rumah sakit masih terbatas terutama pelayanan kamar operasi, kelas III, PICU, NICU, ICU dan VIP.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Metode isu-isu strategis dan penentuan hasil isu-isu strategis dengan menggunakan kajian analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT). Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022 antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan rujukan tingkat lanjut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.
2. Pelaksanaan pelayanan medis belum secara optimal dilandasi good clinical governance (tata kelola klinis yang baik) dan good governance (tata kelola Rumah Sakit yang baik) dalam menghadapi era JKN dan persaingan dengan Rumah Sakit swasta.
3. Belum optimalnya pengembangan sumber daya Rumah Sakit untuk menunjang pengembangan pelayanan rujukan tingkat lanjut serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
4. Belum optimalnya pemeliharaan/ pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan Rumah Sakit untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

3.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menyusun perencanaan untuk pengembangan pelayanan rumah sakit perlu dilakukan analisis dan langkah-langkah sistematis mulai dari analisis SWOT, yang meliputi Analisis Eksternal dan Internal dan Posisi Rumah Sakit berdasar Analisis SWOT.

3.6.1. Kondisi Lingkungan Internal

Analisis kondisi lingkungan internal RSUD Dr. H. Kumpulan Pane dapat digambarkan sebagai berikut :

(1). Kekuatan (Strength)

- RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi pola pengelolaan keuangannya dengan PPK-BLUD
- Kuantitas SDM memadai
- Sarana dan peralatan kedokteran yang canggih dan penggunaan teknologi kedokteran yang tepat dan unggul serta kemampuan rumah sakit dalam *service innovations* (pelayanan unggulan)
- Telah terakreditasi
- Satu satunya Rumah Sakit di kota tebing tinggi dengan type B non pendidikan dan sebagai Rumah Sakit rujukan regional setempat
- Adanya kerjasama pelayanan dengan pihak ketiga

(2). Kelemahan (Weakness)

- Pelayanan Rumah Sakit belum optimal
- Banyaknya SDM yang profesional khususnya tenaga medik yang bekerja di tempat pesaing
- Masih banyak menggunakan tenaga kontrak hingga membebani anggaran Rumah Sakit
- Perda tarif pelayanan sudah tidak layak
- Kapasitas SDM kurang memadai

3.6.2. Kondisi Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi Eksternal secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi lingkungan eksternal dapat digambarkan sebagai berikut :

(1) Peluang

- Letak Rumah Sakit yang strategis, mudah dijangkau dan berbagai arah
- Adanya komitmen pemerintah kota tebing tinggi dengan adanya subsidi anggaran;
- Adanya kepercayaan masyarakat Tebing Tinggi dan sekitarnya menggunakan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit;
- Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan di Rumah Sakit
- Adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(2) Tantangan

- Banyaknya Rumah Sakit/ sarana pelayanan kesehatan pesaing di Kota Tebing Tinggi.
- Rumah Sakit tidak memiliki kewenangan teritorial
- Sering adanya keterlambatan dalam pengklaiman BPJS
- Sistem pelayanan BPJS dengan sistem paket

3.6.3. Telaah Terhadap RTRW dan KLHS

Faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari RTRW dan KLHP sebagai berikut

Faktor-faktor Penghambat ;

- Keterbatasan luas lahan.
- Banyaknya Unit Pelayanan Kesehatan pesaing baik Pelayanan dasar maupun pelayanan Rujukan

Faktor-faktor Pendorong ;

- Lokasi Gedung di Lingkungan perkotaan
- Lokasi Kota Tebing Tinggi merupakan daerah Interland yang memudahkan masyarakat Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, untuk mendukung visi Walikota Tebing Tinggi dan Wakil Walikota terpilih tahun 2017-2022 yaitu “Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas” dan misi “Menjadikan Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa” maka RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan kapasitas SDM baik tenaga fungsional maupun manajemen
2. Efisiensi penggunaan sumber daya
3. Peningkatan sarana yang mengikuti ilmu perkembangan kedokteran
4. Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
5. Mengoptimalkan sistem koordinasi
6. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal
7. Mengoptimalkan sistem keamanan dan ketertiban rumah sakit

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi seperti berikut :

1. Tujuan

Terwujudnya kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar, mandiri dan terpadu dan berkapasitas regional

2. Sasaran

Optimalisasi pelayanan kesehatan

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target kinerja, tujuan/ sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar, mandiri dan terpadu dan berkapasitas regional	Optimalisasi pelayanan kesehatan	1. Peningkatan Status Rumah Sakit	B non Pendidikan	B non Pendidikan	B Pendidikan	B Pendidikan	B Pendidikan	B Pendidikan	B Pendidikan

			2. Peningkatan Status Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Dasar	Tingkat Dasar	Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna	Tingkat Paripurna
			3. Persentase Kemampuan Rumah sakit Dalam pembiayaan operasional secara mandiri dengan Pola PPK-BLUD Rumah Sakit Pemerintah	80 %	83 %	86 %	90 %	93 %	93%

4.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas

Sesuai dengan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi seperti berikut :

Misi 1 : *Mewujudkan tata kelola pemerintah Kota Tebing Tinggi yang baik*

Strategi : Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran

Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan Jasa Kantor

Misi 3 : *Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa*

Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat

Tabel 4.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

VISI : Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas			
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah Kota Tebing Tinggi yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan jasa pelayanan kantor
Misi 3 : Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar, mandiri, terpadu dan berkapasitas regional	Optimalisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat

Dalam rangka Peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat sebagaimana arah kebijakan yang ditetapkan, RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi memiliki prinsip dan nilai-nilai dasar

Motto

“Kami Peduli Kesehatan Anda”

Motto yang dimiliki RSUD Dr.H.Kumpulan Pane berusaha untuk dapat melayani pasien dengan kerendahan hati dan ikhlas (senyum, sapa, sentuh). Dengan demikian pasien akan merasa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sempurna, dihargai dan merasa puas terhadap pelayanan di RSUD Dr.H.Kumpulan Pane.

Nilai-Nilai

Dalam mendukung Strategis arah kebijakan, memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan budaya kerja, menjadi landasan, pegangan dan pedoman bagi direksi, unit kerja manajemen, unit kerja pelayanan, dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Nilai-nilai Dasar (core values) yang diterapkan di Rumah Sakit mengambil singkatan dari nama Rumah Sakit **KUMPULAN PANE** yaitu :

MerangKUl Masyarakat dalam memberikan Pelayanan UngguLAN yang PAteN dan berEmpati

Keyakinan dasar (*Core Beliefs*) RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi adalah Profesional dalam Melayani yang dilandasi semangat kebersamaan, dengan demikian visi dan misi RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi dapat diwujudkan dengan semangat kerja sama seluruh jajaran sebagai suatu tim dengan berpegang teguh pada nilai Profesional dalam Melayani.

4.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.3.1 Kerangka Pendanaan

4.3.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin.

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja OPD RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi terpilih tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja UPTD RSUD Dr.H.Kumpulan Pane untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi terpilih tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	n/a	80	80	90	90	100	100
2	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart kelas B non Pendidikan	70	70	72	75	78	80	80

3	Peningkatan status Rumah Sakit	B non pendidikan	B non pendidikan	B non pendidikan	B pendidikan	B pendidikan	B pendidikan	B pendidikan
4	Persentase kemampuan Rumah Sakit dalam pembiayaan operasional secara mandiri dengan pola PPK-BLUD	61	61	69	73	76	80	80
6	Persentase sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40	40	42	50	54	60	60
7	Peningkatan status akreditasi Rumah Sakit	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	paripurna	paripurna	paripurna
8	Jumlah kunjungan rawat jalan	61.156	65.200	73.634	82.763	90.672	98.492	98.492
9	Jumlah hari perawatan rawat inap	58.108	58.108	58.308	58.508	58.708	58.908	58.908
10	BOR	71	71	73	75	77	80	80
11	ALOS	8	8	7	7	7	7	7
12	TOI	3	3	3	3	3	2	2
13	BTO	34	34	36	37	38	40	40
14	GDR	8	8	6	5	4	3	3
15	NDR	4	2	3	2	2	2	2
16	Persentase kepuasan pelanggan	85	85	86	87	88	90	90

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja tahunan RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu unsur yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi khususnya misi ketiga yaitu “*Menjadikan Tebing Tinggi sebagai kota jasa*”.

Dukungan *stake holder* terutama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, DPRD Kota Tebing Tinggi, Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Pihak swasta dan masyarakat sangat kami harapkan dalam pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.

Rencana Strategis juga dibuat sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan harapan Renstra yang telah disusun ini akan memberikan arah dan kebijakan serta strategi dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran pada setiap tahunnya dalam lima tahun ke depan dan dapat terlaksana dengan baik, dan terus menerus secara berkesinambungan, terkoordinasi, dan terkontrol sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dan dihasilkan suatu kinerja yang baik. Untuk dapat terwujud implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen tinggi, kerja keras, dedikasi, dan loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Akhirnya untuk penyempurnaan dokumen Rencana Strategis ini, diharapkan sumbang sarana dan kritik membangun untuk mendukung keberhasilan Program Pemerintah Kota Tebing Tinggi, terima kasih.